

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengendalian intern pemerintah di Indonesia diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Berdasarkan peraturan tersebut menjelaskan bahwa sistem pengendalian intern adalah :

“Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”(PP Nomor 60 Tahun 2008).

Untuk melaksanakan pengendalian intern di pemerintah maka dibentuklah Aparat Pengendalian Intern Pemerintah (APIP) yang terdiri dari BPKP, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/ Kota. Tujuan pengawasan APIP ini adalah: untuk mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunan.(Murwanto dkk, 2006).

Dari keterangan tersebut dapat diartikan bahwa pengendalian intern itu sangat berperan penting demi tercapainya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel. Salah satu pengendalian intern ini dapat berupa pengamanan aset.

Pengamanan aset daerah adalah bagian penting pemerintah dan masyarakat, karena bila terjadi keteledoran dalam pengamanan aset dapat mengakibatkan terjadinya pencurian, penggelapan maupun bentuk manipulasi lainnya. Jika hal tersebut terjadi, maka dapat merugikan instansi pemerintah dan masyarakat, maka

dari itu diperlukan pengendalian yang kuat, setiap instansi pemerintah harus menumbuhkan dan menjaga lingkungan pengendalian yang baik sehingga dapat memunculkan perilaku positif dalam manajemen yang sehat.

Hal ini dapat dilakukan dengan penegakan integritas dan nilai-nilai etika yang dilakukan seluruh pegawai, komitmen, adanya kepemimpinan yang kondusif, tersusunnya struktur organisasi yang mendukung strategi pencapaian tujuan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, kebijakan yang sehat dalam pembinaan sumber daya manusia, terakhir peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang efektif kemudian menjalin hubungan kerja yang baik antar instansi.

Dalam sebuah lembaga pemerintah banyak menerapkan sistem akuntansi. Dan salah satu sistem yang digunakan pemerintah adalah sistem pengeluaran kas, dimana sistem tersebut mencatat kejadian yang sering kali dilakukan terutama untuk pengeluaran. Dalam kegiatan operasional kas merupakan komponen yang penting dalam jalannya sistem pemerintahan. Karena kas mempunyai sifat gampang digelapkan sehingga dibutuhkan pengendalian intern pada kas dengan cara pemisahan fungsi pekerjaan (Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008).

Selain hal diatas pemerintah juga mengadakan pemantauan berkelanjutan terhadap fungsi pengeluaran kas, untuk memperkecil terjadinya penyelewengan kas. Demi terciptanya pengendalian intern yang baik, pemerintah harus memberikan tanggung jawab kepada setiap pegawai, apabila terjadi suatu kesalahan dan dalam merumuskan tanggung jawab tidak dilakukan dengan baik maka tidak jelas kepada siapa hal tersebut disalahkan. Dalam memantau aktifitas pengeluaran kas, diperlukannya pengendalian intern yang baik terhadap kas dengan

menggunakan peraturan yang sesuai untuk melindungi pengeluaran kas (PP Nomor 60 Tahun 2008).

Setiap pemerintahan mempunyai peraturan mereka masing-masing sesuai dengan faktor-faktor yang ada di lingkungan pemerintah.

Dapat digambarkan, bahwasannya sistem pengendalian intern pengeluaran kas tidak dapat dilakukan dengan hanya melihat saja, melainkan harus terintegasi kedalam sebuah kegiatan. Demi tercapainya tujuan organisasi sebagaimana tertulis dalam visi dan misi yang ditetapkan diperlukan peran seluruh staf/ pegawai pemerintah. Namun demikian, hal tersebut bukan berarti hanya mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya, akan tetapi menjadi suatu bagian penting dalam pencapaian tujuan, dimana harus diiringi dengan sumber daya yang efektif dan efisien, baik sumber daya manusia maupun sumber daya keuangan. Dengan cara membuat laporan keuangan yang handal dan pengelolaan kekayaan milik daerah yang baik dan aman sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Terkait dengan uraian di atas, dapat kita ketahui bahwa pelaksanaan sistem pengendalian intern pengeluaran kas menjadi salah satu hal yang penting bagi setiap bagian pemerintah, baik pusat maupun daerah dalam rangka mewujudkan laporan keuangan yang akuntabel. Salah satu diantaranya yaitu yang melakukan amanat ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Padang yang selanjutnya disingkat dengan (BPKAD) selaku instansi pemerintah. Maka penulis tertarik untuk membahasnya dengan judul **“Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk Pengeluaran Kas Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui : “Bagaimana Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk pengeluaran kas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang?”

1.3 Tujuan

Adapun tujuan penulis membuat tugas akhir ini adalah untuk dapat mengetahui bagaimana Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk pengeluaran kas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang.

1.4 Manfaat

Adapun manfaat yang ingin diperoleh penulis dari tugas akhir ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penulis diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang penerapan teori-teori yang telah didapat saat perkuliahan kedalam dunia kerja yang sesungguhnya dan menambah pengetahuan seputar Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk Pengeluaran Kas khususnya Intansi Pemerintah.

2. Bagi Instansi

Hasil pembahasan ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan oleh BPKAD Kota Padang dalam mengambil keputusan, serta dapat digunakan untuk

menentukan dan mengembangkan kebijakan yang berhubungan dengan usaha peningkatan kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk Pengeluaran Kas.

3. Pihak lain

Dapat menjadi bahan referensi dan tambahan informasi atau masukkan dalam pengembangan masalah dan solusi di bidang kajian yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini dan bidang lainnya pada umumnya, bagi peneliti selanjutnya maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan atas masalah yang sama.

1.5 Tempat dan Waktu Magang

Pada kegiatan magang ini penulis memilih tempat di BPKAD Kota Padang. Dan pelaksanaan atau waktu magang ini berlangsung 40 hari kerja yang telah menjadi ketetapan dari pihak akademik.

1.6 Sistematika Pembuatan Tugas Akhir

Agar pembahasan laporan magang ini lebih mudah dan terarah, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat magang, tempat dan waktu magang, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka, uraian kualitatif, dan permasalahan lainnya yang menjadi dasar pemikiran dalam pembuatan laporan.

BAB III : GAMBARAN UMUM INSTANSI

Menggambarkan kondisi umum perusahaan mengenai sejarah singkat BPKAD Kota Padang, visi dan misi BPKAD Kota Padang, struktur organisasi dan bentuk aktivitas usaha BPKAD Kota Padang.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini berisikan pembahasan masalah meliputi hasil yang diperoleh pada saat magang mengenai **“Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk Pengeluaran Kas di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang”**.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya.

1.7 Ruang Lingkup Pembahasan

Untuk pengeluaran kas ini penulis hanya membahas pengeluaran kas pemerintah daerah di bagian belanja terkhususnya belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

